

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 7 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2025

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almustla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Politik Identitas Perpektif Al-Quran (Studi Penafsiran Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fi Zilal Quran)

Efrin Kurniadi¹, Kiki Muhamad Hakiki², Masruchin³

Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung¹

Email: efrinkurniadi123@gmail.com¹

kiki.hakiki@radenintan.ac.id²

masruchin80@radenintan.ac.id³

Keywords :

*Identity Politics,
Qur'an
Sayyid Qutb
Tafsir Fi Zilal al-Qur'an.*

Abstract

This study aims to discuss identity politics in the perspective of the Qur'an based on the interpretation of Sayyid Qutb in his tafsir Fi Zilal al-Qur'an. Sayyid Qutb emphasizes that identity politics in Islam must be based on the principles of tawhid (the oneness of Allah) and hakimiyyah (the sovereignty of Allah), where Muslims should build their political identity based on Islamic values that uphold justice, brotherhood, and social welfare. This research uses a descriptive qualitative method with a library research approach, where data is collected through the analysis of literature from Fi Zilal al-Qur'an and other supporting sources. The results of the study indicate that identity politics in Islam can have both positive and negative impacts, depending on how it is implemented. If it is based on pure Islam, identity politics can strengthen the unity of the ummah and uphold justice. Sayyid Qutb also strongly criticizes identity politics oriented toward secularism, as it can lead Muslims away from the principles of the Qur'an. Therefore, this study emphasizes that the best solution in addressing identity politics is to return to the Qur'an as the main guide in building a just and civilized social and political system.

Keywords :

*Politik Identitas
Al-Qur'an,
Sayyid Qutub,
Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas politik identitas dalam perspektif Al-Qur'an berdasarkan penafsiran Sayyid Qutb dalam tafsir *Fi Zilal al-Qur'an*. Sayyid Qutb menekankan bahwa politik identitas dalam Islam harus berlandaskan prinsip tauhid dan *hakimiyyah* (keaulatan Allah), di mana umat Islam harus membangun identitas politiknya berdasarkan nilai-nilai Islam yang menegakkan keadilan, persaudaraan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), di mana data dikumpulkan melalui analisis literatur dari tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* serta sumber-sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dalam Islam dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung pada bagaimana ia dijalankan. Jika berlandaskan Islam yang murni, politik identitas dapat memperkuat persatuan umat dan menegakkan keadilan. Sayyid Qutb juga

mengkritik keras politik identitas yang berorientasi pada sekularisme, karena dapat menjauhkan umat Islam dari prinsip-prinsip ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa solusi terbaik dalam menghadapi politik identitas adalah kembali kepada Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam membangun sistem sosial dan politik yang adil dan berkeadaban.

Article History :

Received :
01 Mei 2025

Accepted :
27 Juni 2025

A. Pendahuluan

Al-Quran adalah kitab Suci yang terakhir dan diperuntukkan manusia agar mendapat petunjuk (*hudan li al-nas dan hudan li al-muttaqin*). Sebagaimana dinyatakan oleh Fazlur Rahman bahwa “Fungsi Al-Quran yang pada awalnya hanya menjadi nasihat dan tuntunan ibadah, maka saat ini sudah semestinya dapat membentuk tatanan masyarakat” (Rahman, 2017). Turunnya Al-Quran untuk mengatur, memberi arahan dan menjadi pedoman manusia dalam segala urusan agar mencapai kesuksesan baik di dunia dan Akhirat. Sehingga tidak ada satupun sesuatu yang terlepas dari pembahasan Al-Quran, termasuk politik. Bahkan sebelum suara ajakan berkumandang Al-Quran sudah terlebih dahulu memberikan nilai-nilai dan etika. (Atika Septina dkk., 2023)

Membahas terkait kontestasi politik yang tersaji di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memang menarik. Heterogenitas bangsa Indonesia menjadi hal tersendiri yang perlu menjadi sorotan. Karena, dalam proses mendapatkan kemenangan dalam pertandingan politik tentunya butuh instrumen kuat untuk mendapatkan kemenangan. Identitas Ras, Etnis, Suku, Agama pun menjadi barang unik ketika ajang perebutan politik berjalan. (I Putu Sastra Wingarta dkk., 2021) Mengenai keberagaman atau heterogenitas ini, sejatinya Al-Quran sudah memberikan gambaran terkait hal yang demikian. Dalam QS. Al-Hujurat: 13, Allah Swt Berfirman:

بَيَّأَهَا لِلنَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Politik identitas menjadi salah satu fenomena sosial yang terus berkembang dalam dinamika politik global, termasuk di negara-negara dengan mayoritas Muslim. (Dinar Astuti dkk., 2023) Dalam berbagai kasus, politik identitas dapat menjadi alat untuk memperjuangkan hak-hak kelompok tertentu, Disisi lain, juga berpotensi menciptakan eksklusivitas dan konflik sosial.

Politik identitas sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperkuat dominasi dan kepentingannya dengan cara mengeksploitasi perbedaan suku, ras, atau agama. (Nasrudin & Nurdin, 2019) Hal ini menciptakan polarisasi sosial yang

bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan persatuan, keadilan, dan persaudaraan. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan bahwa perpecahan tersebut bukan karena ketidaktahuan, tetapi sering kali disebabkan oleh kedengkian dan egoisme kelompok tertentu yang ingin mempertahankan kekuasaan atau kepentingannya sendiri. Seperti yang diterangkan dalam QS. Al-Baqarah: 213 yang berbunyi :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

Artinya: “Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketaubidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk)”.

Ayat ini menegaskan bahwa pada awalnya, manusia adalah satu umat yang bersatu tanpa adanya perbedaan yang menciptakan perselisihan. Seiring waktu, muncul perpecahan akibat kepentingan, kedengkian, dan perbedaan dalam memahami petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah. Dalam konteks politik identitas, ayat ini relevan karena menunjukkan bahwa perpecahan dalam suatu kelompok sering kali terjadi karena faktor internal, seperti kepentingan golongan, egoisme, atau interpretasi yang bias terhadap ajaran agama dan hukum.

Penelitian terkait dengan politik identitas diantaranya “Politik Identitas Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)” yang ditulis oleh fathul mu’in dan kawan-kawan (Mu’in dkk., 2024), kemudian tema berjudul “Islam Dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024” yang ditulis oleh Taufik Hidayat dan Miftahul Hidayah (T. Hidayat & Hidayah, 2023). Penelitian berjudul “Politik identitas dalam tafsir Al-Mishbah (tela'ah konseptual pemikiran M. Quraish Shihab dan implikasinya pada dinamika politik di Indonesia)” ditulis oleh M. Mismubarak (M. Mismubarak, 2024). Dari ketiga penelitian di atas menunjukkan bahwa secara spesifik belum ada yang mengkaji tentang politik identitas dalam tafsir fi zilal quran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai sumber literatur yang relevan (Mahanun, 2021). Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis politik identitas berdasarkan sumber kepustakaan. Data yang dikumpulkan diolah menggunakan content analysis dengan pendekatan normatif untuk memperoleh

pemahaman yang tepat. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu kitab tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, serta data sekunder berupa ayat-ayat tematik, buku-buku, dan jurnal terkait pemikiran Sayyid Qutb

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Sayyid Qutb dalam tafsir *Fi Zbilal al-Qur'an* mengenai politik identitas dan implikasinya terhadap kehidupan politik umat Islam. Hal ini penting agar umat Islam dapat memahami bahwa politik identitas dalam Islam seharusnya tidak hanya digunakan sebagai alat perjuangan kelompok tertentu, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih luas dan memperkuat persatuan umat dalam keberagaman. Kajian terhadap tafsir Sayyid Qutb ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan politik identitas yang berpotensi menimbulkan eksklusivitas dan perpecahan, dan membantu membangun tatanan sosial dan politik yang adil dan berkeadaban, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Politik Identitas Perspektif Al-Quran (Studi Penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilal al-Quran)".

B. Hasil dan Pembahasan

1. Politik Identitas

Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok, ras, etnis, suku, negara, budaya, agama, atau yang lain untuk mencapai tujuan politik tertentu. (Rambe & Mayasari, 2022) Politik identitas dalam praktiknya sangat bisa terlihat karena didasarkan pada kesamaan identitas suatu kelompok ditengah masyarakat yang plural. Praktik politik identitas juga tak jarang menjadi sumber konflik ditengah masyarakat, dimana masyarakat yang merasa kelompoknya superior melawan kelompok inferior ataupun kelompok mayoritas melawan kelompok minoritas. (Wingarta dkk., t.t.) Penjabaran dari identitas politik menjadi politik identitas sendiri adalah identitas politik yang dianut oleh warga negara yang berkaitan dengan arah politiknya. Politik identitas sendiri lahir dari sebuah kelompok sosial yang seakan merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Hal ini yang menjadi dasar mengapa politik identitas lahir (Sari, 2020).

Kajian politik dalam membedakan politik identitas (*political of identity*) dan identitas politik (*political identity*) sudah sangat jelas diterangkan dan kandungan keduanya sangat berbeda. Politik identitas diartikan sebagai mekanisme politik pengorganisasian identitas sebagai sumber dan sarana politik. Sedangkan identitas politik adalah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik (Budiardjo, 2002).

Politik Identitas merupakan perilaku politis yang berusaha ingin menyumbangkan aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, memimpin terhadap distribusi nilai-nilai yang dianggap berharga sampai akhirnya tuntutan yang paling fundamental, seperti penentuan kemauannya pribadi atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas terinspirasi dengan adanya upaya memasukan nilai-nilai terhadap peraturan daerah, menyendirikan

tempat pemerintahan, kemauan menetapkan otonomi khusus hingga dengan terbentuknya gerakan separatis. Sedangkan dalam konteks keimanan atau keyakinan politik identitas terefleksikan dari bermacam upaya supaya memasukan nilai-nilai keagamaan terhadap proses pembentukan kebijakan, termasuk gencarnya perda syariah, maupun usaha membentuk sebuah kota identik dengan agama tertentu (Nasrudin, 2019).

Permasalahan yang terjadi ini akhirnya menjadi semakin besar dengan adanya kelompok-kelompok yang mengaku sebagai nasionalisme falsafah yang harus diakui oleh masyarakat Indonesia sebagai pondasi untuk saling menghargai dan menerima dengan adanya perbedaan atau bisa disebut sebagai keragaman, yang sudah diakui sejak awal negara ini merdeka. Adapun keragaman yang ada di Indonesia ini antara lain yaitu perbedaan agama, suku, adat istiadat, bahasa, dan masih banyak lagi. Akhirnya nasionalis ini terbentuk menjadi komunitas yang solid dalam menjunjung ketegasan berkaitan arah politik identitasnya. (Aidah dkk., 2023)

Politik identitas di Indonesia pada dasarnya sudah mempunyai konstruksi yang kuat dari zaman penjajahan hingga zaman kemerdekaan. Persamaan identitas sebagai warga negara yang baru merdeka melahirkan rasa dan sikap nasionalisme yang tinggi dari masyarakat untuk menunjukkan politik identitas mereka dalam menyelenggarakan ketatanegaraan.

Politik identitas merupakan strategi politik yang digunakan oleh kelompok berdasarkan kesamaan ras, etnis, suku, agama, atau budaya untuk mencapai kepentingan tertentu. Dalam masyarakat yang plural, politik identitas dapat menjadi sarana perjuangan hak kelompok tertentu, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik antara kelompok mayoritas dan minoritas. Politik identitas muncul sebagai respons terhadap perasaan terpinggirkan atau didiskriminasi oleh kekuatan dominan dalam pemerintahan. Perbedaan antara politik identitas dan identitas politik terletak pada tujuannya, di mana politik identitas berfokus pada pengorganisasian identitas sebagai sarana politik, sedangkan identitas politik lebih menyoroti posisi individu dalam komunitas politik. Dalam praktiknya, politik identitas dapat mengambil berbagai bentuk, seperti perjuangan etnis untuk mendapatkan otonomi khusus, penerapan nilai-nilai agama dalam kebijakan publik, hingga gerakan separatis. Di Indonesia, politik identitas telah berkembang sejak masa penjajahan dan terus mengalami dinamika hingga era modern. Nasionalisme menjadi faktor yang memperkuat politik identitas, dengan membentuk komunitas yang menegaskan arah politiknya berdasarkan nilai-nilai yang mereka anut. Persamaan identitas sebagai bangsa yang baru merdeka telah melahirkan semangat nasionalisme yang tinggi, di mana politik identitas menjadi bagian dari upaya membangun ketatanegaraan yang sesuai dengan keberagaman yang telah diakui sejak awal berdirinya negara Indonesia.

2. Al-Qur'an

Secara etimologi Al-Qur'an berasal dari kata *qara-a*, *yaqra-u*, *qira'atan* atau *qur-anan* yang berarti mengumpulkan (*Al-Jam'u*) dan menghimpun (*Aldhammo*) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Dikatakan Al-Qur'an karena ia

berisikan intisari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan (Kandir, 2016). Sementara itu para ulama memberikan pendapat yang berbedabeda mengenai asal kata al-Qur'an. Menurut gramatika bahasa Arab bahwa kata "Al-Qur'an" adalah bentuk mashdar dari kata qara'a yang maknanya muradif (*sinomin*) dengan kata qira'ah, artinya bacaan tampaknya tidak menyalahi aturan, karena mengingat pemakaian yang dipergunakan al-Qur'an dalam berbagai tempat dan ayat. Misalnya Q.S. Al-Qiyamah ayat 17-18. Artinya: "Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kamu telah selesai membacaknya maka ikutilah bacaannya itu".

Sedangkan di dalam pengertian Al-Qur'an menurut istilah (terminologi), Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang pertama dan yang paling utama menurut kepercayaan umat Islam dan diakui kebenarannya. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat firman-firman (wahyu) Allah, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasul Allah secara berangsur-angsur yang bertujuan menjadi petunjuk bagi umat Islam dalam hidup dan kehidupannya guna mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat (Daulay dkk., 2023).

3. Biografi Sayyid Quthb

Nama lengkap Sayyid Quthb adalah Sayyid Quthb Ibrahim Husain. Ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di Kampung Mausyah, salah satu provinsi Asyuth, di dataran tinggi Mesir. Ia dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang menitik-beratkan ajaran Islam dan mencintai al-Qur'an. Ia merupakan anak ketiga dari 5 adik-beradik, yang terdiri dari tiga perempuan dan dua lelaki. Ayahnya bernama al-Haj Quthb bin Ibrahim dan ibunya bernama Sayyidah Nafash Quthb (Quthb, 1992).

Sayyid Quthb menempuh pendidikan dasar di desanya selama empat tahun dan ia bergelar hafizh ketika berusia sepuluh tahun, ia juga sering mengikuti lomba hafalan al-Qur'an di desanya. Pengetahuannya yang mendalam dan luas tentang al-Qur'an dalam konteks pendidikan agama, tampaknya mempunyai pengaruh yang kuat pada hidupnya. Menyadari bakatnya, orang tuanya memindahkan keluarganya ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Tahun 1929 ia memperoleh kesempatan masuk ke Tajhiziah Darul Ulum (nama lama Universitas Kairo, sebuah universitas yang terkemuka di dalam bidang pengkajian ilmu Islam dan sastra arab, dan juga tempat al-Imam Hasan al-Banna belajar sebelumnya). Pada tahun 1933 ia memperoleh ijazah S1 dalam bidang sastra dan diploma dalam bidang tarbiah.

Setelah lulus kuliah, ia bekerja di Departemen Pendidikan dengan tugas sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah milik Departemen Pendidikan selama enam tahun. Setelah itu ia berpindah kerja sebagai pegawai kantor di Departemen Pendidikan sebagai pemilik untuk beberapa waktu, kemudian berpindah tugas lagi di Lembaga Pengawasan Pendidikan Umum selama delapan tahun. Sewaktu di lembaga ini, ia mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuannya di bidang pendidikan selama dua tahun. Ketika di sana, ia membagi waktu studinya antara *Wilson's Teacher's College* di Washington (saat ini

bernama *the University of the District of Columbia*) dan *Greeley College di Colorado*, lalu setelah selesai ia meraih gelar MA di universitas itu dan juga di Stanford University. Setelah tamat kuliah ia sempat berkunjung ke Inggris, Swiss dan Italia.

Sayyid Quthb adalah seorang mujahid dan pemburu Islam terkemuka yang lahir di abad ke 20, ia adalah tokoh monumental dengan segenap kontroversinya. Pikiran- pikirannya yang tajam dan kritis sudah tersebar dalam berbagai karya besar yang menjadi rujukan berbagai gerakan Islam.

Karya- karya Sayyid Quthb selain beredar di Negara-negara Islam, juga beredar di kawasan Eropa, Afrika, Asia dan Amerika. Di mana terdapat pengikut- pengikut Ikhwanul Muslimin, hamper dipastikan di sana ada bukubukunya, karena ia merupakan tokoh Ikhwan terkemuka.

Buku- buku hasil torehan tangan Sayyid Quthb adalah sebagai berikut (N. Hidayat, 2005):

- a. *Muhimmatus Sya'ir fil Hayah wa Syi'r al-Jail al-Hadhir*, terbit tahun 1933.
- b. *As- Sathi' al- Majhul*, kumpulan sajak Quthb satu-satunya, terbit Februari 1935.
- c. *Naqd Kitab "Mustaqbal ats-Tsaqafah di Mishr"* li ad-Duktur Thaha Husain, terbit tahun 1939.
- d. *At- Tashwir al- Fanni fil-Qur'an*, buku Islamnya yang pertama, terbit April 1954.
- e. *Al- Athyaf al-Arba'ah*, ditulis bersama- sama saudaranya : Aminah, Muhammad dan Hamidah, terbit tahun 1945.
- f. *Thilf min al-Qaryah*, berisi tentang gambaran desanya, serta catatan masa kecilnya di desa, terbitan 1946.
- g. *Al-Madinah al-Manshurah*, sebuah kisah khayalan semisal kisah Seribu Satu Malam, terbit tahun 1946.
- h. *Kutub wa Syakhshiyat*, sebuah studinya terhadap karya-karya pengarang lain, terbit tahun 1946.
- i. *Ashwak*, terbit tahun 1947.
- j. *Mashahid al-Qiyamah fil-Qur'an*, bagian kedua dari serial *Pustaka Baru al-Qur'an* terbit pada bulan April 1947.
- k. *Raudhatul Thifl*, ditulis bersama Aminah as'said dan Yusuf Murad, terbit dua episode.
- l. *Al- Qashash ad- Diniy*, ditulis bersama Abdul Hamid Jaudah as- Sahar.
- m. *Al- Jadid al-Lughah al-Arabiyyah*, bersama penulis lain.
- n. *Al- Adalah al-Ijtima' iyah fil al-Islam*. Buku pertamanya dalam pemikiran Islam, terbit April 1949.
- o. *Ma'rakah al-Islam wa ar- Ra' simaliyah*, terbit Februari 1951.
- p. *As- Salam al- Islami wa al-Islam*, terbit Oktober 1951.
- q. *Tafsir Fi-Zhilal al-Qur'an*, diterbit dalam tiga masa yang berlainan.
- r. *Dirasat Islamiah*, kumpulan bermacam artikel yang dihimpun oleh Muhibbudin al- Khatib, terbit 1953.
- s. *Al- Mustaqbal li Hadza ad-Din*, buku penyempurna dari buku *Hadza ad-Din*.

- t. *Khashaish at-Tashawwur al-Islami wa Muqawwimatahu*, buku dia yang mendalam yang dikhususkan untuk membicarakan karakteristik akidah dan unsur-unsurnya.
- u. *Al-Islami wa Musykilat al-Hadharah*.
- v. *Ma' alim fith-Thariq*.

4. Tafsir Fi Zhilail Qur'an

Tafsir Fi Zhilail Qur'an disebut juga dengan tafsir pergerakan, adalah karya yang menjadi tanda daya intelektualnya Sayyid Qulthb, dan juz pertama tafsir ini muncul pada tahun 1952 dan beliau telah menyelesaikan penelitian tafsir ini sebanyak 30 juz pada akhir tahun lima puluhan, yaitu mengambil masa kira-kira hampir delapan tahun. Tafsir ini mempunyai delapan jilid kesemuanya, dan tiap-tiap jilid itu dianggarkan mempunyai ketebalan kurang lebih sekitar 600 halaman. Kata Zhilail bila diterjemahkan berarti "naungan". (Firdaus & Zulaiha, 2022) Adapun alasan Sayyid Qutb menulis dan menamakan tafsirnya dengan Fi Zhilail Qur'an ialah dikarenakan tafsir itu mempunyai hubungan secara langsung terkait dengan kehidupannya, ditulis dengan tinta penderitaan dan kesengsaraan besar yang disebabkan oleh ketidakadilan dan pemerintahan yang tidak adil pada saat itu (Al-Khalidi, 2004). Beliau terkena perlakuan yang biadab, dan kesedihannya menyebabkan dia bergantung pada Allah dan menghargai Al-Qur'an, sebagaimana yang tercatat dalam riwayat hidupnya bahwa sejak kecil beliau telah menghafal Al-Qur'an dan dengan keahliannya dalam bidang bahasa sekaligus dapat mendorongnya memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar. Maka kehidupan beliau yang sentiasa terarah kepada ajaran Al-Qur'an menyebabkan beliau merasakan hidup dalam "naungan Al-Qur'an" menjadi sebuah kenikmatan dalam hidup. Hal ini dapat dibuktikan seperti dalam catatan muqaddimah tafsirnya yaitu: *"Hidup dibawah naungan Al-Qur'an adalah kenikmatan. Kenikmatan itu tidak dapat diraih kecuali bagi orang yang merasakannya. Kenikmatan itu mengangkat umur, memberkatinya dan mensucikannya. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku kehidupan dibawah naungan Al-Qur'an dalam periode zaman ini."* (Husna Ameilia Lilena dkk., 2024)

Yang menjadi tujuan dalam penulisan Tafsir Fi Zhilail Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. *Pertama*, menghilangkan jurang yang dalam antara kaum muslimin dengan Al-Qur'an.
- b. *Kedua*, mengenalkan kepada muslimin saat ini pada fungsi amaliyah harakiyah Al-Qur'an.
- c. *Ketiga*, membekali orang-orang muslim dengan petunjuk amaliyah tertulis menuju ciri-ciri kepribadian Islami yang dituntut, serta menuju ciri-ciri Islami yang Qur'an.
- d. *Keempat*, mendidik orang muslim dengan pendidikan Qur'ani yang integral, membangun kepribadian Islam yang efektif, menjelaskan karakteristik dan cirinya, faktor-faktor pembentukan dan kehidupannya.
- e. *Kelima*, menjelaskan ciri-ciri masyarakat Islam yang dibentuk oleh Al-Qur'an, mengenalkan asas-asas yang menjadi pijakan masyarakat Islami, menggariskan jalan yang bersifat gerakan dan jihad untuk membangunnya (Islami & Hakim, 2024).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*literature review*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai sumber literatur yang relevan (Mahanun, 2021). Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis politik identitas berdasarkan sumber kepustakaan. Data yang dikumpulkan diolah menggunakan content analysis dengan pendekatan normatif untuk memperoleh pemahaman yang tepat. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu kitab tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, serta data sekunder berupa ayat-ayat tematik, buku-buku, dan jurnal terkait pemikiran Sayyid Qutb. Analisis data dilakukan dengan metode *content analysis*, sementara pendekatan yang digunakan meliputi metode induktif, yang menarik kesimpulan umum dari data khusus, serta metode komparatif, yang membandingkan konsep-konsep relevan untuk memperkaya analisis dalam penelitian ini.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk politik identitas menurut perspektif Al-Quran berdasarkan penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilal Qur'an

Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fi Zilal al-Qur'an* menyoroti politik identitas sebagai sebuah realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Dalam perspektifnya, politik identitas dalam Islam didasarkan pada prinsip tauhid, yaitu pengesaan Allah sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konsep ini menekankan bahwa umat Islam harus membangun identitas politik yang berbasis pada nilai-nilai Islam, bukan sekadar identitas etnis atau kelompok. Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan politik dan identitas, Sayyid Qutb sering mengacu pada konsep *hākimiyyah* (kedaulatan Allah), di mana ia menegaskan bahwa hukum dan sistem politik yang benar adalah yang berlandaskan syariat Islam. Dalam tafsirnya, Sayyid Qutb juga mengkritik keras praktik politik identitas yang hanya digunakan untuk kepentingan duniawi atau kepentingan kelompok tertentu yang bertentangan dengan Islam. Ia menolak konsep politik yang dipisahkan dari agama atau berorientasi pada sekularisme, karena hal tersebut dianggap dapat merusak tatanan sosial Islam yang ideal (Quthb, 1992). Oleh sebab itu, Sayyid Qutb menyerukan agar umat Islam kembali kepada nilai-nilai Islam yang hakiki sebagai identitas utama, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam sistem politik dan pemerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* melalui berbagai ayat yang relevan. Seperti yang penulis tulis dalam bentuk tabel terkait ayat didalam tafsiran Tafsir Fi Zhilal Qur'an yang menyangkut politik identitas:

Tabel 1: Bentuk Politik Identitas dalam Perspektif Al-Qur'an Menurut Tafsir Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilal Qur'an

Aspek	Penjelasan	Ayat Terkait
-------	------------	--------------

Dasar Politik Identitas	Politik identitas dalam Islam didasarkan pada prinsip tauhid dan <i>hakimiyyah</i> (kedaulatan Allah)	QS. Al-Ma'idah: 44
Tujuan Politik Identitas	Menegakkan keadilan dan membangun persaudaraan Islam (<i>ukhuwah islamiyah</i>), bukan untuk kepentingan duniawi semata	QS. Al-Hujurat: 13
Bahaya Politik Identitas yang Salah	Politik identitas yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau sekularisme dapat menimbulkan perpecahan umat Islam	QS. Al-An'am: 159
Identitas Islam sebagai Prioritas	Loyalitas utama umat Islam harus kepada Islam, bukan etnis, suku, atau ideologi sekuler	QS. Al-Anfal: 73

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan didalam perspektif Sayyid Qutb dalam tafsir *Fi Zilal al-Qur'an*, politik identitas dalam Islam harus berlandaskan prinsip tauhid dan *hakimiyyah* (kedaulatan Allah), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah: 44. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem politik yang benar harus berpegang teguh pada syariat Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, tujuan politik identitas dalam Islam adalah menegakkan keadilan dan membangun persaudaraan Islam (*ukhuwah islamiyah*), sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurat: 13, yang menekankan pentingnya saling mengenal dan bersatu dalam keberagaman. Namun, Sayyid Qutb juga memperingatkan bahaya politik identitas yang salah, yaitu ketika politik identitas digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu atau berorientasi pada sekularisme, yang dapat menyebabkan perpecahan di antara umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-An'am: 159. Oleh karena itu, Islam menempatkan identitas Islam sebagai prioritas utama bagi umatnya, bukan berdasarkan etnis, suku, atau ideologi sekuler, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anfal: 73. Dengan demikian, politik identitas dalam Islam harus dikelola secara bijak dan tidak boleh menjadi alat untuk memecah belah umat, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat persatuan, keadilan, dan keberlanjutan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan politik.

Politik identitas Islam harus bertumpu pada persaudaraan umat Islam (*ukhuwah islamiyah*) dan tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan duniawi semata. Ia mengkritik keras sistem politik yang berbasis pada kepentingan kelompok tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, terutama sistem yang mengadopsi sekularisme dan memisahkan agama dari kehidupan politik. Dalam tafsirnya, Sayyid Qutb mengajak umat Islam untuk kembali kepada nilai-nilai Islam sebagai identitas utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam ranah politik.

2. Dampak yang ditimbulkan dari politik identitas berdasarkan penafsiran Sayyid Qutub dalam Tafsir Fi Zilal Qur'an

Politik identitas merupakan fenomena sosial yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tafsirnya *Fi Zilāl al-Qur’ān*, Sayyid Qutb menyoroti bahwa politik identitas memiliki peran penting dalam membangun tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam, tetapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan jika disalahgunakan. Menurutnya, politik identitas dalam Islam harus berpegang pada prinsip tauhid dan keadilan, sehingga dapat menciptakan harmoni di tengah masyarakat yang beragama. Namun, ketika politik identitas digunakan sebagai alat untuk kepentingan kelompok tertentu tanpa memperhatikan nilai-nilai Islam, maka dampak negatif pun tidak dapat dihindari.

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari politik identitas yang keliru adalah munculnya perpecahan dalam tubuh umat Islam. Sayyid Qutb dalam tafsirnya terhadap QS. Al-An’am: 159 menegaskan bahwa perpecahan yang terjadi akibat kepentingan politik duniawi adalah bentuk penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. Ia mengingatkan bahwa umat Islam yang terpecah-belah akibat fanatisme kelompok akan melemahkan kekuatan mereka sendiri dan membuka peluang bagi pihak lain untuk menguasai mereka. Sayyid Qutb juga mengkritik keras politik identitas yang berorientasi pada sekularisme. Dalam pandangannya, politik yang memisahkan agama dari kehidupan sosial dan pemerintahan akan menyebabkan umat Islam kehilangan jati diri dan mudah terpengaruh oleh ideologi asing yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ia menafsirkan QS. Al-Ma’idah: 44 sebagai peringatan bahwa mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah telah keluar dari jalan yang benar dan dapat jatuh ke dalam kezaliman.

Politik identitas yang tidak dikelola dengan baik juga dapat memicu diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Sayyid Qutb dalam tafsirnya menyoroti bahwa dalam Islam, keberagaman adalah bagian dari sunnatullah yang harus dikelola dengan bijak, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat: 13. Namun, ketika politik identitas digunakan untuk memperkuat dominasi suatu kelompok atas kelompok lain, maka akan terjadi ketimpangan sosial yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Di sisi lain, politik identitas yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang benar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sayyid Qutb menegaskan bahwa politik identitas yang dijalankan dengan prinsip tauhid dan ukhuwah Islamiyah dapat menjadi alat perjuangan dalam menegakkan keadilan dan membangun masyarakat yang berkeadaban. Ia menafsirkan QS. Al-Anfal: 73 sebagai dorongan bagi umat Islam untuk bersatu dalam satu identitas Islam yang kuat demi mencapai kemajuan bersama, dalam praktiknya, politik identitas seringkali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Sayyid Qutb mengingatkan bahwa kelompok yang menggunakan politik identitas untuk kepentingan duniawi sering kali memanipulasi agama dan nilai-nilai sosial demi kepentingan mereka sendiri. Dalam tafsirnya terhadap QS. Al-Baqarah: 213, ia menjelaskan bahwa perpecahan yang terjadi di antara umat terdahulu disebabkan oleh kedengkian dan ambisi kelompok tertentu yang ingin mempertahankan dominasinya

(Qutb, 2000). Dampak lain dari politik identitas yang tidak terkendali adalah meningkatnya konflik sektarian. Sayyid Qutb menyoroti bahwa perpecahan yang terjadi di antara kelompok-kelompok Muslim akibat politik identitas dapat melemahkan umat Islam secara keseluruhan. Dalam tafsirnya terhadap QS. Al-Anfal: 73, ia menekankan bahwa ketika umat Islam tidak bersatu dalam identitas Islam yang benar, mereka akan menjadi lemah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Dalam konteks global, Sayyid Qutb juga mengingatkan bahwa politik identitas dapat digunakan oleh pihak luar untuk melemahkan umat Islam. Ia menafsirkan QS. Ali Imran: 103 sebagai seruan bagi umat Islam untuk berpegang teguh pada tali Allah dan tidak terpecah-belah akibat pengaruh eksternal. Menurutnya, sejarah telah menunjukkan bahwa ketika umat Islam bersatu, mereka mampu membangun peradaban yang maju, tetapi ketika mereka terpecah, mereka mudah dijajah dan dikendalikan oleh kekuatan asing.

Sebagai solusi, Sayyid Qutb menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam membangun politik identitas yang sehat. Ia menyerukan agar umat Islam menjadikan Islam sebagai dasar dalam membangun sistem sosial dan politik yang adil, serta menghindari segala bentuk politik identitas yang hanya menguntungkan kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan persatuan dan keadilan. Dengan demikian, politik identitas menurut Sayyid Qutb memiliki dua sisi: jika dikelola dengan baik dan berlandaskan nilai-nilai Islam, ia dapat menjadi alat perjuangan yang positif dalam menegakkan keadilan dan persatuan. Namun, jika disalahgunakan, politik identitas dapat menjadi sumber perpecahan, diskriminasi, dan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami politik identitas dalam kerangka ajaran Islam yang benar agar dapat membawa manfaat bagi seluruh umat manusia.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap politik identitas dalam perspektif Al-Qur'an menurut tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb, dapat disimpulkan Politik identitas menurut Sayyid Qutb dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* harus berlandaskan pada prinsip tauhid (keesaan Allah) dan hākimiyyah (kedaulatan Allah). Dalam hal ini, Sayyid Qutb menekankan bahwa umat Islam harus membangun identitas politiknya berdasarkan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan, persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah), dan kesejahteraan sosial. Politik identitas dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan identitas etnis atau kelompok, tetapi harus didasarkan pada landasan agama yang murni. Sayyid Qutb menolak politik identitas yang terpisah dari agama atau berorientasi pada sekularisme, karena hal ini akan merusak tatanan sosial Islam yang ideal. Politik identitas dalam perspektif Sayyid Qutb adalah sarana untuk memperjuangkan prinsip keadilan sosial dan mempererat persatuan umat Islam berdasarkan nilai-nilai Islam yang hakiki.

Politik identitas dapat memberikan dampak positif atau negatif tergantung bagaimana penerapannya dalam kehidupan sosial dan politik. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa politik identitas yang berdasarkan Islam yang murni dapat memperkuat persatuan

umat Islam dan menegakkan keadilan, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat: 13 dan QS. Al-Anfal: 73. Namun, politik identitas yang disalahgunakan, terutama yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau sekularisme, dapat menimbulkan perpecahan umat Islam, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial, sebagaimana yang diingatkan dalam QS. Al-An'am: 159 dan QS. Al-Ma'idah: 44.

Sayyid Qutb juga memperingatkan bahwa politik identitas yang memisahkan agama dari kehidupan sosial dan pemerintahan akan melemahkan jati diri umat Islam dan membuka pintu pengaruh asing yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dampak negatif dari politik identitas yang salah arah ini dapat memperburuk hubungan antar kelompok dan memperburuk ketimpangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, Sayyid Qutb menyerukan umat Islam untuk kembali kepada Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam membangun politik identitas yang sehat dan adil, yang dapat membawa keadilan sosial dan memperkuat persatuan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah Et all, Pengenalan Al-Qur'an, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (5), 2023.
- Amroeni Drajat, *Ulumu Qur'an: Pengantar Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Depok: Kencana, 2017.
- Aidah, N. L., Rochmadian, S., & Maliha, U. (2023). Politik Identitas Dalam Pemilu dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(1), 117–136. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.411>
- Al-Khalidi, S. A. F. (2004). *Pengantar Memahami Tafsir Fî Zhilâlil Qur'ân*. Era Intermedia.
- Atika Septina, Muyasaroh Muyasaroh, Dwi Noviani, & Destri Wulandari. (2023). Al-Qur'an Dan Urgensinya Dalam Kehidupan Manusia. *Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, 4(3), 127–135. <https://doi.org/10.59059/tarim.v4i3.211>
- Budiardjo, M. (2002). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Daulay, S. S., Suciyandhani, A., Sofian, S., Julaiha, J., & Ardiansyah, A. (2023). Pengenalan Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754505>
- Dinar Astuti, Agustang, A., & Idrus, I. I. (2023). POLITIK IDENTITAS DALAM KONTROVERSI ISU DI INDONESIA. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(6), 1769–1778. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.888>
- Firdaus, M. Y., & Zulaiha, E. (2022). Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fî Zhilalil al-Qur'an Karya Sayyid Qutb. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 2717–2730. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.2553>
- Hidayat, N. (2005). *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*. Gema Insani.
- Hidayat, T., & Hidayah, M. (2023). "Islam Dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024." *Asketik: Jurnal Agama dan*

- Perubaban Sosial*, 7(2).
<https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1163>
- Husna Ameilia Lilena, Septiawadi Kari Mukmin, & Abuzar Al-Ghifari. (2024). Nilai-Nilai Adab Penuntut Ilmu dalam Al-Qur'an: Analisis Interpretasi QS. al-Kahfi dalam Tafsir fi Zhilal al-Qur'an. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 4(2), 646–664.
<https://doi.org/10.19109/jjsq.v4i2.24210>
- I Putu Sastra Wingarta, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, & Reda Wicaksono. (2021). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lembhansas RI*, 9(4), 117–124.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>
- Islami, W. N., & Hakim, M. N. (2024). *TELAAH KARAKTERISTIK TAFSIR FI DZILAL AL-QUR'AN KARYA SAYYID QUTB DAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP NILAI-NILAI MAQASID AL-QUR'AN*. 10(01).
- Kandir, N. (2016). *Al-Qur'an Sumber Segala Ilmu*. Pustaka Al-Mandiri.
- M. Mismubarak. (2024). "Politik identitas dalam tafsir *Al-Mishbah* (tela'ah konseptual pemikiran M. Quraish Shihab dan implikasinya pada dinamika politik di Indonesia)." PTIQ Jakarta.
- Mahanun. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal Of Education*, 1(2). <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Mu'in, F., Sa'ad, S., Ayubi, S. A., & Ghufron, I. A. (2024). Politik Identitas Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik). *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 10(1).
https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.647
- Nasrudin, J. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1).
<https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>
- Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>
- Qutb, S. (2000). *Keadilan Sosial dalam Islam*. Islamic Book Trust.
- Quthb, S. (1992). *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*. Gema Insani Press.
- Rahman, F. (2017). *Kata Pengantar Dalam Islam*. Mizan.
- Rambe, T., & Mayasari, S. (2022). POLITIK IDENTITAS DAN KRISIS IDENTITAS: MENGUNGKAP REALITAS PRAKTEK POLITIK DI INDONESIA. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarabatan dan Pranata Sosial*, 8(1), 91–105. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5608>
- Sari, I. (2020). Politik Identitas Komunitas Bali Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuwasin. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(1).
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Ampera/article/view/5203>
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (t.t.). *PENGARUH POLITIK IDENTITAS TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA*.